Model manajemen

by Lucky Kartanto

Submission date: 22-Nov-2019 01:07PM (UTC+0700)

Submission ID: 1219315508

File name: MODEL_MANAJEMEN_PAJAK_BERBASIS_PERATURAN.pdf (594.15K)

Word count: 2113

Character count: 13867

MODEL MANAJEMEN PAJAK BERBASIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN

Lucky Kartanto
Program Studi Doktor Ilmu Manajemen STIESIA Surabaya
kkplucky@gmail.com



Pajak mer alakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuat 22 eningkatkan kesejahteraan bersama. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan ma 26 h kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan. Potensi yang bisa digunakan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri bert 37 pajak. Perlunya Manajemen Pajak dalam rangka untuk melakukan pembayaran pajak seefisien mungkin tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dalam penelitian ini adalah menemukan Model manaj 32 n perpajakan berupa Decision Support System yang berbasis peraturan perundang-undangan perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan Studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Model Manajemen Pajak yang berbasis peraturan perundangan perpajakan output berupa Decision Support System terkait dengan Model manajemen Perpajakan tersebut.

Keywords: Pajak, Manajemen Pajak, Decision Support System

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahte bersama. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah kemanajan suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan. Potensi yang bisa digunakan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan/jasa timbal balik secara langsu 14 dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu sektor penerimaan pemerintah yaitu pajak. Pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Usaha ini ditempuh dengan melakukan perubahan peraturan perpajakan. Hal ini dilakukan untuk merevisi aturan lama yang ada Relemahannya agar penerimaan dari sektor pajak dapat diperoleh secara maksimal.

Indonesia menganut Self Assessment System yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Fiskus, dalam hal ini aparat Direktorat Jendral Pajak hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan. Penagihan pajak dalam sistem Self Assessment dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang galak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.

Agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Berbagai cara ditempuh oleh perusahaan supaya keuntungan perusahaan bertambah antara lain dengan mengurangi biaya produksi.

Tetapi hal itu belum cukup dilakukan oleh perusahaan karena masih banyak pengurangpengurang laba yang harus ditanggung oleh perusahaan, di antaranya adalah pajak.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara optimal sering dengan perencanaan pajak (tax planning) atau tax sheltering. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam peraturan perpajakan (Suandy, 2011: 1).

Upaya dalam penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak, legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak (Suandy, 2011: 6).

24

1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan

Dengan Mempertimbangkan latar belakang di atas, maka Rumgen Masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimana Model Manajemen Pajak Berbasis Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang Efektif?

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan :

- 1. Model Manajemen Pajak berupa *Decision Support System* berbasis peraturan perundangundangan Perpajakan Terkait Pajak Penghasilan Badan
- Model Manajemen Pajak berupa Decision Support System berbasis peraturan perundangundangan Perpajakan Terkait Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badar
- Model Manajemen Pajak berupa Decision Support System berbasis peraturan perundangundangan Perpajakan Terkait Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) 15, 21, 22, 23, dan 24 Wajib Pajak Badan

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Menurut Stoner dalam Handoko (2009 : 8): "Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan".

Menurut Follet dalam Handoko (2009 : 8) : "Manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain".

Menurut Hasibuan (2007 : 2) : "Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan Sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu".

Menurut Bernardine R. Wirjana (2007:11) definisi manajemen adalah: "Manajemen adalah suatu proses di mana orang -orang yang bertanggung jawab dalam suatu organisasi, menyelesaikan tugas-tugas melalui upaya- upaya orang lain dalam kegiatan kelompok"

Pengertian manaje 35 n pajak lebih dititikberatkan pada wajib pajak. Salah satu diantaranya adalah definisi menurut Sophar Lumba 111 ruan (1996). Sebagaimana dikutip dari Suandy (2011, hal.6), Lumbantoruan mendefinisikan manajemen pajak sbb: "Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan".

Lebih lanjut, menurut Lumbantoruan, tujuan manajemen pajak adalah untuk menerapkan peraturan perpajakan dengan benar sebagai usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas (13) g diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi- fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

- 1. Perencanaan pajak (Tax Planning),
- 2. Pelaksanaan kewajiban pajak (Tax Implementation), dan
- 3. Pengendalian pajak (Tax Control)

Definisi lainnya dikutip dari 12 han (2015, hal.13). Pohan mendefinisikan manajemen perpajakan sebagai berikut : "Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal- hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola degan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan". 15

Menurut Raymond McLeod, Jr. (1998) Sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem yang menyediakan kemampuan untuk penyelesaian masalah dan komunikasi untuk permasalahan yang bersifat semi-terstruktur.

Menurut Keen (1980) Sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang dibangun lewat sebuah proses adaptif dari pembelajaran, pola-pola penggunan dan evolusi sistem.

Menurut Lumbantoruan (1994 : 354) secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi ketentuan perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan manajemen pajak adalah:

- 1. Menerapkan peraturan perpajakan yang benar.
- 2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.
- 3. Membayar pajak menurut hukum dan peraturan yang berlaku.
- Menghindari hal-hal yang tidak terduga.

Menurut Turban (1995) beberapa karakteristik dari Decision Support System adalah:

- Sistem pendukung keputusan dirancang untuk membantu mengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur ataupun tidak terstruktur
- Dalam proses pengolahannya, sistem pendukung keputusan mengkombinasikan penggunaan model-model / teknik-teknik analisis dengan teknik pemasukan data konvensional serta fungsi-fungsi pencari/interogasi informasi.
- Sistem pendukung keputusan, dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan/dioperasikan dengan mudah oleh orang-orang yang tidak memiliki dasar kemampuan pengoprasian computer yang tinggi. Oleh karena itu pendekatan yang diguanakan biasanya model interaktif
- Sistem pendukung keputusan dirancang dengan menekankan pada aspek fleksibilitas serta kemampuan adaptasi yangtinggi. Sehingga mudah disesuaikan dengan perubahna lingkungan yang terjadi dan kebutuhan pemakai.

Secara garis besar DSS dibangun oleh tiga komponen besar:

- Database
- Model Base
- 3. Software System

Dalam DSS, data dikumpulkan ke dalam sebuah database dan diorganisasikan oleh Database management software (DBMS), dan model penyampaian informasinya dikumpulkan ke dalam model base dan diorganisasikan oleh model base management 36 ware (MBMS).

Proses pengambilan keputusan melibatkan 4 tahapan, yaitu: (Desi Sri Wahyuni ≥stari, Pengertian DSS, http://desi1209.blogspot.com, diakses tanggal 29 Juli 2017)

1. Tahap Intelligence

Dalam tahap ini pengambil keputusan mempelajari kenyataan yang terjadi sehingga bisa dapat mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah yang sedang terjadi, biasanya dilakukan analisis berurutan dari sistem ke sub sistem pembentuknya. Dari tahap, ini didapatkan keluaran berupa dokumen pernyataan masalah.

2. Tahap Design

Dalam tahap ini pengambil keputusan menemukan, mengembangkan, dan menganalisis semua pemecahan yang mungkin, yaitu melalui pembuatan model yang bisa mewakili kondisi nyata masalah. Dari tahap ini didapatkan keluaran berupa dokumen alternatif solusi.

Tahap Choice

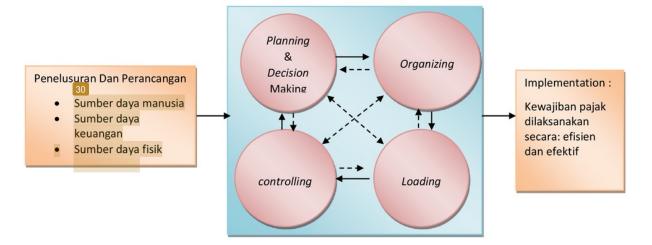
Dalam tahap, ini pengambil keputusan memilih salah satu alternatif pemecahan yang dibuat pada tahap design yang dipandang sebagai aksi yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Dari tahap ini didapatkan keluaran berupa dokumen solusi dan rencana implementasinya.

4. Tahap Implementation

Dalam tahap ini pengambil keputusan menjalankan rangkaian aksi pemecahan yang dipilih di tahap choice. Implementasi yang sukses ditandai dengan terjawabnya masalah yang dihadapi, sementara kegagalan ditandai dengan tetap adanya masalah yang sedang dicoba untuk diatasi. Dari tahap ini didapatkan keluaran berupa laporan pelaksanaan solusi dan hasilnya.

Design

2.2 Kerangka Penelitian



3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Pendekatar 17 alam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan paradigma Studi kepustakaan, yaitu dengan menghimpun informasi yang relevan de an topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang masih berlaku.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan Pengolahan bahan penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan yang sesuai dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan penelitian yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan perpajakan dengan mempergunakan cara content analysis.

3.3 Enalisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Tahapan Analisis Data dalam Manajemen Pajak

I ahapan Analisis Da	ata dalam Manajemen Paj			
Jenis Pajak	Input	Proses	Output	
Pajak	1. Data Neraca	 Melakukan 	1. Saldo 34 raca	
Penghasilan	Saldo Perusahaan	Mapping Terkait	Saldo dan Biaya-	
Badan	Sebelum Koreksi	Biaya-Biaya	Biaya yang telah	
	Fiskal.	Pada Neraca	sesuai dengan	
	2. Data Buku	Saldo	Peraturan	
	Besar Perusahaan	Berdasarkan	Peundang-	
		38da Pasal 6 dan	Undangan	
		Pasal 9 UU PPH.	Perpajakan dan	
		Menyiapkan	mengefisiensikan	
		Daftar Nominatif	pembayaran	
		Biaya	pajak	
		Entertainment		
		dan Biaya		
		Promosi 9Jika		
		Ada).		
		3. Menunda		
		Penghasilan		
		4. Mempercepat		
		pembebanan		
		Biaya		
		Memasukkan		
		program CSR		
		Mengoptimalkan		
		Kredit Pajak		
Pajak	Data Gaji Karyawan	Melakukan Perhitungan	Data Gaji Karyawan yang	
Penghasilan	, ,	Pegawai yang akan	akan diberikan tunjangan	
Pasal 21		diberikan Tunjangan PPH	PPH dan Yang tidak 21	
Pajak	 Data Neraca 	 Melakukan 	Saldo Neraca Saldo dan	
Penghasilan	Saldo	Mapping Obyek	Biaya-Biaya yang telah	
Pasal 22	Perusahaan	PPh Pasal 22	sesuai dengan ketentuan	
	Sebelum	Melakukan	PPh Pasal 22	
	Koreksi Fiskal.	Ekualisasi Obyek		
	2. Data Buku	PPH pasal 22		
	Besar			
	Perusahaan			
Pajak	1. Data Neraca	1. Melakukan	Saldo Neraca Saldo dan	
Penghasilan	Saldo	Mapping Obyek	Biaya-Biaya yang telah	
Pasal 23	Perusahaan	PPh Pasal 23		

	0-11	0 Malalada	and the second section of
	Sebelum Koreksi Fiskal.	Melakukar Ekualisasi Obyek	sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 23
	2. Data Buku	PPH pasal 23	FFII FaSal 23
	Besar	FFIT pasar 25	
	Perusahaan		13
Pajak	1. Data Neraca	1. Melakukan	Saldo Neraca Saldo dan
Penghasilan	Saldo	Mapping Obyek	Biaya-Biaya yang telah
Pasal 26	Perusahaan	PPh Pasal 26	333 uai dengan ketentuan
1 4341 20	Sebelum	2. Melakukan	PPh Pasal 26
	Koreksi	Ekualisasi Obyek	11111 434120
	Fiskal.	PPH pasal 26	
	2. Data Buku	1111 pasar 20	
	Besar		
	Perusahaan		
Pajak	1. Data Neraca	1. Melakukan	Saldo Neraca Saldo dan
Penghasilan	Saldo	29 pping Obyek	31 ya-Biaya yang telah
Pasal 4 ayat (2)	Perusahaan	PPh Pasal 4 Ayat 2	sesuai dengan ketentuan
l dodi i djat (2)	Sebelum	2. Melakukan	PPh Pasal 4 ayat (2)
	Koreksi	Ekualisasi Obyek	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Fiskal.	PPH pasal 4 Ayat	
	2. Data Buku	(2)	
	Besar	(=)	
	Perusahaan		
Pajak	1. Data Neraca	Melakukan Mapping	Saldo Neraca Saldo dan
Penghasilan	Saldo	Obyek PPh Pasal	Biaya-Biaya yang telah
Pasal 15	Perusahaan	26	sesuai dengan ketentuan
	Sebelum	Melakukan	PPh Pasal 15
	Koreksi	Ekualisasi Obyek	
	Fiskal.	PPH pasal 15	
	2. Data Buku		
	Besar		
	Perusahaan		
Pajak	1. Data Neraca	Melakukan Mapping	Saldo Neraca Saldo dan
Pertambahan	Saldo	Obyek Paja Pasal	Biaya-Biaya yang telah
Nilai (PPN)	Perusahaan	PPN	sesuai dengan ketentuan
	Sebelum	Melakukan Ekualisasi	PPh Pasal PPN
	Koreksi Fiskal.	Obyek PPH pasal	
	2. Data Buku	PPN	
	Besar		
	Perusahaan		

REFERENSI

Effendi Usman, 2011, Asas Manajemen, Rajawali Pers, Jakarta

Griffin, R.W, 2013, *Management, 11th Edition,* South -Western:Cengage Learning.

Handoko, T, Hani, 2009, Manajemen Edisi 5, BPFE, Yogyakarta.

Hasibuan, SP, Malayu, 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia Cetakan ke-9, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Herujito, M, Yayat, 2001, Dasar-Dasar Manajemen, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Lumbantoruan Sophar, 1994, *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Pohan, Anwar Chairil, 2015, Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Robbin, S.P dan Coulter, M, 2012, Management, Prentice Hall, New Jersey.

Rogers-Glabush, 2015, IBFD International Tax Glossary 7th Revised Edition, IBFD, Amsterdam, Belanda. Suandy Erly, 2011, Hukum Pajak Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta

Wirjana, R, Bernadine, 2007, Kepemimpinan, Dasar-Dasar dan Pengembangannya, CV. Andi offset, Yogyakarta

Turban, E., Aronson, J., E., and Liang, T., (2009). Decision Support Systems and Intelligent Systems, 7th Ed, jilid 1, Andi Offset, Yogyakarta.

Model manajemen

ORIGINALITY REPORT

SIMILARITY INDEX

62%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

www.scribd.com

Internet Source

wafflox.blogspot.com

Internet Source

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas

Indonesia

Student Paper

Submitted to Tarumanagara University

Student Paper

3%

cerdasakuntansi.com

Internet Source

id.scribd.com

Internet Source

www.koleksiskripsi.com

Internet Source

repository.usu.ac.id

5

	Internet Source	2%
10	iniblogirwan.blogspot.com Internet Source	2%
11	slideplayer.info Internet Source	2%
12	repository.unpas.ac.id Internet Source	2%
13	Submitted to iGroup Student Paper	2%
14	eprints.ung.ac.id Internet Source	2%
15	mabrurprananda.wordpress.com Internet Source	1%
16	jurnal.umk.ac.id Internet Source	1%
17	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1%
18	docplayer.info Internet Source	1%
19	oxtyaziza.blogspot.com Internet Source	1%
20	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1%

21	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
22	media.neliti.com Internet Source	1%
23	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
24	Submitted to Trisakti University Student Paper	1%
25	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
26	jumardy.wordpress.com Internet Source	1%
27	Submitted to Universitas Riau Student Paper	1%
28	Submitted to Swansea Metropolitan University Student Paper	1%
29	es.scribd.com Internet Source	1%
30	www.kasnadi.com Internet Source	1%
31	pusku.kemhan.go.id Internet Source	<1%

repository.upnyk.ac.id

Exclude quotes Off

Off

Exclude bibliography

Exclude matches

Off